

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
(RENJA-P)**



**KECAMATAN HALONG  
KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2024 dapat disusun.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2024, nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2024. Serta diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur Kecamatan Halong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2024 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang.

Halong, 01 Juli 2024

**CAMAT HALONG**  
**RAHMADI, S.Sos., M.AP**  
**NIP. 19810914 201001 1 009**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	6
C. Maksud dan Tujuan .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023 .....	10
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA .....	21
A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perubahannya .....	21
B. Dampak Sosial Ekonomi .....	33
BAB IV PENUTUP .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ada perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 hanya ada 1 (satu) dan merupakan Indikator dari Tujuan SKPD. Yang menjadi penyebab dari tersebut adalah, bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dilakukan sebelum Pohon Kinerja dan Cascading Kecamatan Terbaru selesai disusun. Namun pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan merupakan Sasaran SKPD.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) adalah Dokumen Perencanaan Perubahan yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif Sub Kegiatan. Mendukung terwujudnya Good Governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (Result Oriented Government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Kecamatan Halong merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) menjadi mutlak, yaitu menjadi pedoman di Lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.

Selanjutnya, dari sisi dinamika Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian Target-Target RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, khususnya Target Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2024. Dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Balangan yang harus disesuaikan, serta untuk menyempurnakan perencanaan agar bisa dilaksanakan dengan maksimal, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Kecamatan Halong Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Halong, yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong dimulai dari usulan setiap Seksi atau PPTK dan juga dari Sekretariat, kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Halong untuk menentukan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan Review Hasil Evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Halong menetapkan Sasaran Kinerja

yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian terhadap suatu sasaran.

Pencapaian IKU Kecamatan Halong sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

**Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Halong sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	84	86,63	103,13%
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	120	69	57,50%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%

Adapun Formulasi Perhitungan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana di atas, adalah sebagai berikut.

**FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani Dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi Dikali 100%
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100%
5	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100%

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana di atas, berikut Jumlah Pagu dan Realisasi Pagu sampai dengan Bulan Juni 2024 (Semester I), adalah sebagai berikut :

**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BESERTA PAGU DAN REALISASINYA SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
01	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>575.771.300,00</b>	<b>186.471.000,00</b>	32,39%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	575.771.300,00	186.471.000,00	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	575.771.300,00	186.471.000,00	
02	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>249.728.200,00</b>	<b>94.683.200,00</b>	35,06%
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.690.000,00	20.500.000,00	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>201.038.200,00</b>	<b>74.183.200,00</b>	
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	201.038.200,00	74.183.200,00	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>56.025.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>56.025.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	56.025.000,00	12.500.000,00			
03	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>67.910.000,00</b>	<b>29.160.000,00</b>	39,08%
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman</b>	<b>67.910.000,00</b>	<b>29.160.000,00</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	67.910.000,00	29.160.000,00	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>36.670.000,00</b>	<b>17.940.000,00</b>	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>36.670.000,00</b>	<b>17.940.000,00</b>	
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	36.670.000,00	17.940.000,00	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>76.120.000,00</b>	<b>23.520.000,00</b>	
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>76.120.000,00</b>	<b>23.520.000,00</b>			
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76.120.000,00	23.520.000,00			
04	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>155.314.600,00</b>	<b>55.455.000,00</b>	35,70%
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>155.314.600,00</b>	<b>55.455.000,00</b>	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	49.714.600,00	24.685.000,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.020.000,00	-	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15.160.000,00	5.965.000,00	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	60.420.000,00	24.805.000,00			

05	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>135.260.000,00</b>	<b>58.910.000,00</b>	43,55%
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>135.260.000,00</b>	<b>58.910.000,00</b>	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75.220.000,00	23.810.000,00	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.770.000,00	7.800.000,00	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	40.270.000,00	27.300.000,00	

## B. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);

12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

1. Mewujudkan Sinergitas dan Singkronisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Pengalokasian Anggaran secara Efektifitas dan Efisiensi sehingga menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur pada Kecamatan Halong dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Sasaran dan Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk.
3. Memberikan informasi kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong.
4. Mempermudah Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2024.
5. Memberikan pedoman dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing Seksi dan Sub Bagian pada Lingkungan Kecamatan Halong.

## **b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2024 ini adalah, sebagai Penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Halong Tahun 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

## **D. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

BAB IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024**

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong diukur berdasarkan target yang dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka Pengumpulan Data Kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Capaian Kinerja Kecamatan Halong Tahun 2024, sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Halong 2021-2026. Hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan Target Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Kecamatan Halong pada Tahun 2024 melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya Sasaran Strategis.

Berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II, maka untuk Capaian Kinerjanya adalah 55,20%, sedangkan Realisasi Anggarannya adalah sebesar 35,85%. Uraian selengkapnya terkait Capaian Kinerja per indikator sampai dengan Bulan Juni 2024, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 1 (satu) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua)

dokumen. Hal ini dikarenakan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sudah selesai disusun, sedangkan untuk Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 maupun masih dalam Tahap Penyusunan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0,00%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 246.300,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau masih belum ada dokumen yang disusun dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen. Hal ini dikarenakan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025 belum dientri pada Aplikasi SIPD-RI, begitupun dengan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 belum dientri pada Aplikasi SIPD. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0,00%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 281.300,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 2 (dua) laporan, dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) laporan. Hal ini dikarenakan Laporan Pengukuran Kinerja (LKIP) Tahun 2023 yang disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023 yang disampaikan ke Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban BPKPAD Kabupaten Balangan sudah selesai disusun dan ditandatangani camat. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 246.300,- atau sebesar 100%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 246.300,-.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 95,45% atau sebanyak 21 Orang/Bulan dari Target Kinerja sebanyak 22 Orang/Bulan, hal ini dikarenakan Kecamatan Halong tidak mendapatkan Kuota PPPK pada Tahun 2024. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 2.006.006.479,- atau sebesar 56,88%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.526.644.401,-.
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 13.857.358,- atau sebesar 37,35%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.099.200,-.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 33,33% atau sebanyak 1 (satu) paket dari Target Kinerja sebanyak 3 (tiga) paket. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0,00% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.458.000,-.
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 175.959.867,- atau sebesar 42,30% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 415.940.000,-.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 8.847.069,- atau sebesar 21,16% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 41.811.300,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 87.776.900,- atau sebesar 42,33% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 207.373.300,-.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 12 (dua belas) unit dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) unit. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 32.913.385,- atau sebesar 25,52% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 128.958.200,-.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 3 (tiga) unit dari Target Kinerja sebanyak 3

(tiga) unit. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 16.800.000,- atau sebesar 45,40% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.008.000,-.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
    - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Capaian Kinerjanya adalah sebesar 52,38% atau sebanyak 11 (sebelas) laporan dari Target Kinerja sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 186.471.000,- atau sebesar 32,39%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 575.771.300,-.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
  - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 2 (dua) laporan dari Target Kinerja sebanyak 4 (empat) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 20.500.000,- atau sebesar 42,10%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 48.690.000,-.
  - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
    - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 24 Keluarga dari Target Kinerja sebanyak 24

Keluarga. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 74.183.200,- atau sebesar 36,90%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 201.038.200,-.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
    - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 29.160.000,- atau sebesar 42,94%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 67.910.000,-.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
    - Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 100 (seratus) orang dari Target Kinerja sebanyak 200 (dua ratus) orang. Hal ini dikarenakan baru 1 (satu) kali kegiatan yang dilaksanakan dari target sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 17.940.000,- atau sebesar 48,92%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 36.670.000,-.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 2 (dua) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 24.685.000,- atau sebesar 49,65%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.714.600,-.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 25% atau sebanyak 1 (satu) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 4 (empat) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 23.810.000,- atau sebesar 31,65%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 75.220.000,-.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau belum ada kegiatan yang dilaksanakan dari Target Kinerja sebanyak 3 (tiga) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0,00%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.020.000,-.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.  
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau 1 (satu) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 5.965.000,- atau sebesar 39,35%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.160.000,-.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau belum ada kegiatan yang dilaksanakan dari Target Kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 7.800.000,- atau sebesar 39,45%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.770.000,-.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau belum ada kegiatan yang dilaksanakan dari Target Kinerja sebanyak 4 (empat) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 23.520.000,- atau sebesar 30,90%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 76.120.000,-.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 66,67% atau 2 (dua) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 3 (tiga) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 12.500.000,- atau sebesar 22,31%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 56.025.000,-.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau 2 (dua) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 27.300.000,- atau sebesar 67,79%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 40.270.000,-.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 57,14% atau 11 (sebelas) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 24.805.000,- atau sebesar 41,05%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 60.420.000,-.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 sebagaimana penjelasan di atas, dapat juga dilihat pada tabel berikut ini :

**FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**KECAMATAN HALONG**  
**TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	K	Rp	K	Rp	11-10/7x100%	12-6+10	K	Rp
1	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	75.4 Nilai	22.014.650.851	280.6 Nilai	3.852.771.838	70.4 Nilai	4.421.066.301	70.15 Nilai	822.082.353	70.15 Nilai	2.342.407.358	70.15 Nilai	2.342.407.358	99.64	52.98	70.15 Nilai	6.195.179.196	93.04	28.14
1	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	99.486.350	100 Persen	31.574.300	100 Persen	773.900	33.33 Persen	246.300	50 Persen	246.300	50 Persen	246.300	50	31.83	50 Persen	31.820.600	50	31.98
1	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	27.760.300	2 Dokumen	31.323.000	2 Dokumen	246.300	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	50	0	3 Dokumen	31.323.000	37.5	112.83
2	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	14.354.750	2 Dokumen	144.000	2 Dokumen	281.300	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	144.000	25	1
3	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	57.371.300	2 Laporan	107.300	2 Laporan	246.300	2 Laporan	246.300	2 Laporan	246.300	2 Laporan	246.300	100	100	4 Laporan	353.600	50	0.62
3	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100 Persen	18.993.259.501	97.73 Persen	3.122.980.850	100 Persen	3.563.743.601	60.23 Persen	714.076.628	72.73 Persen	2.019.863.837	72.73 Persen	2.019.863.837	72.73	56.68	72.73 Persen	5.142.844.687	72.73	27.08
4	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	18.371.447.301	21 Orang/Bulan	2.953.237.852	22 Orang/Bulan	3.526.644.401	21 Orang/Bulan	708.100.109	21 Orang/Bulan	2.006.006.479	21 Orang/Bulan	2.006.006.479	95.45	56.88	21 Orang/Bulan	4.959.244.331	23.86	26.99
5	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	621.812.200	4 Dokumen	169.742.998	12 Dokumen	37.099.200	3 Dokumen	5.976.519	6 Dokumen	13.857.358	6 Dokumen	13.857.358	50	37.35	10 Dokumen	183.600.356	41.67	29.53
6	2.15.01.2.02.0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100 Persen	1.156.441.000	100 Persen	333.079.970	100 Persen	441.398.000	29.17 Persen	64.041.445	41.67 Persen	175.959.867	41.67 Persen	175.959.867	41.67	39.86	41.67 Persen	509.039.837	41.67	44.02
6	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.019.000	3 Paket	14.916.700	3 Paket	25.458.000	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	33.33	0	4 Paket	14.916.700	33.33	19.88
7	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.040.259.000	12 Laporan	318.163.270	12 Laporan	415.940.000	3 Laporan	64.041.445	6 Laporan	175.959.867	6 Laporan	175.959.867	50	42.3	18 Laporan	494.123.137	37.5	47.5
8	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100 Persen	830.663.600	100 Persen	121.004.176	100 Persen	249.184.600	25 Persen	29.209.835	50 Persen	96.623.969	50 Persen	96.623.969	50	38.78	50 Persen	217.628.145	50	26.2
8	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	224.476.300	12 Laporan	19.375.976	12 Laporan	41.811.300	3 Laporan	5.209.835	6 Laporan	8.847.069	6 Laporan	8.847.069	50	21.16	18 Laporan	28.223.045	37.5	12.57
9	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	606.187.300	12 Laporan	101.628.200	12 Laporan	207.373.300	3 Laporan	24.000.000	6 Laporan	87.776.900	6 Laporan	87.776.900	50	42.33	18 Laporan	189.405.100	37.5	31.25
9	2.15.01.2.09.0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100 Persen	499.994.200	100 Persen	100.204.542	100 Persen	165.966.200	100 Persen	14.508.145	100 Persen	49.713.385	100 Persen	49.713.385	100	29.95	100 Persen	149.917.927	100	29.98
10	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	51 Unit	372.598.200	12 Unit	65.104.542	12 Unit	128.958.200	12 Unit	8.908.145	12 Unit	32.913.385	12 Unit	32.913.385	100	25.52	24 Unit	98.017.927	47.06	26.31
11	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	127.396.000	3 Unit	35.100.000	3 Unit	37.008.000	3 Unit	5.600.000	3 Unit	16.800.000	3 Unit	16.800.000	100	45.4	6 Unit	51.900.000	50	40.74
2	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP</b>	4 Laporan	2.110.200.003	1 Laporan	173.151.000	1 Laporan	575.771.300	0 Laporan	15.800.000	0 Laporan	186.471.000	0 Laporan	186.471.000	0	32.39	1 Laporan	359.622.000	25	17.04
12	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan	100 Persen	1.905.803.003	0 Persen	0	100 Persen	575.771.300	100 Persen	15.800.000	100 Persen	186.471.000	100 Persen	186.471.000	100	32.39	100 Persen	186.471.000	100	9.78
12	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 Laporan	1.905.803.003	0 Laporan	0	21 Laporan	575.771.300	6 Laporan	15.800.000	11 Laporan	186.471.000	11 Laporan	186.471.000	52.38	32.39	11 Laporan	186.471.000	31.43	9.78
3	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP</b>	4 Laporan	1.589.136.442	1 Laporan	115.371.920	1 Laporan	249.728.200	0 Laporan	9.000.000	0 Laporan	94.683.200	0 Laporan	94.683.200	0	37.91	1 Laporan	210.055.120	25	13.22
13	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100 Persen	848.700.000	100 Persen	0	100 Persen	48.690.000	25 Persen	2.600.000	50 Persen	20.500.000	50 Persen	20.500.000	50	42.1	50 Persen	20.500.000	50	2.42
13	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	828.700.000	12 Laporan	0	4 Laporan	48.690.000	1 Laporan	2.600.000	2 Laporan	20.500.000	2 Laporan	20.500.000	50	42.1	14 Laporan	20.500.000	116.67	2.47

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100 Persen	740.436.442	100 Persen	115.371.920	100 Persen	201.038.200	100 Persen	6.400.000	100 Persen	74.183.200	100 Persen	74.183.200	100	36,9	100 Persen	189.555.120	100	25,6
14	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	72 Keluarga	665.436.442	0 Keluarga	0	24 Keluarga	201.038.200	24 Keluarga	6.400.000	24 Keluarga	74.183.200	24 Keluarga	74.183.200	100	36,9	24 Keluarga	74.183.200	33,33	11,15
4	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>246.297.100</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>2.440.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>67.910.000</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>9.600.000</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>29.160.000</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>29.160.000</b>	<b>0</b>	<b>42,94</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>31.600.000</b>	<b>25</b>	<b>12,83</b>
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100 Persen	246.297.100	100 Persen	2.440.000	100 Persen	67.910.000	25 Persen	9.600.000	50 Persen	29.160.000	50 Persen	29.160.000	50	42,94	50 Persen	31.600.000	50	12,83
15	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	246.297.100	12 Laporan	2.440.000	12 Laporan	67.910.000	3 Laporan	9.600.000	6 Laporan	29.160.000	6 Laporan	29.160.000	50	42,94	18 Laporan	31.600.000	37,5	12,83
5	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>121.377.700</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>0</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>36.670.000</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>17.940.000</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>17.940.000</b>	<b>0</b>	<b>48,92</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>17.940.000</b>	<b>25</b>	<b>14,78</b>
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	121.377.700	24 Persen	0	100 Persen	36.670.000	50 Persen	3.000.000	50 Persen	17.940.000	50 Persen	17.940.000	50	48,92	50 Persen	17.940.000	50	14,78
16	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Cuna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Cuna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	600 Orang	121.377.700	0 Orang	0	200 Orang	36.670.000	100 Orang	3.000.000	100 Orang	17.940.000	100 Orang	17.940.000	50	48,92	100 Orang	17.940.000	16,67	14,78
6	7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>1.986.748.926</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>371.269.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>422.719.600</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>27.200.000</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>150.385.000</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>150.385.000</b>	<b>0</b>	<b>35,58</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>521.654.000</b>	<b>25</b>	<b>26,26</b>
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Keempatannya	96 Desa	1.986.748.926	24 Desa	371.269.000	24 Desa	422.719.600	24 Desa	27.200.000	24 Desa	150.385.000	24 Desa	150.385.000	100	35,58	48 Desa	521.654.000	50	26,26
17	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	479.555.326	4 Dokumen	219.819.000	2 Dokumen	49.714.600	0 Dokumen	5.200.000	2 Dokumen	24.685.000	2 Dokumen	24.685.000	100	49,65	6 Dokumen	244.504.000	100	50,99
18	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	232 Dokumen	424.078.200	96 Dokumen	143.400.000	4 Dokumen	75.220.000	1 Dokumen	5.200.000	1 Dokumen	23.810.000	1 Dokumen	23.810.000	25	31,65	97 Dokumen	167.210.000	41,81	39,43
19	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	99.366.200	0 Dokumen	0	3 Dokumen	30.020.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
20	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Dokumen	50.179.600	0 Dokumen	0	2 Dokumen	15.160.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.965.000	1 Dokumen	5.965.000	50	39,35	1 Dokumen	5.965.000	25	11,89
21	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	65.438.700	0 Dokumen	0	1 Dokumen	19.770.000	0 Dokumen	2.600.000	0 Dokumen	7.800.000	0 Dokumen	7.800.000	0	39,45	0	7.800.000	0	11,92
22	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	12 Dokumen	251.957.200	0 Dokumen	0	4 Dokumen	76.120.000	0 Dokumen	5.200.000	0 Dokumen	23.520.000	0 Dokumen	23.520.000	0	30,9	0	23.520.000	0	9,33
23	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	231.025.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	56.025.000	1 Dokumen	0	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	66,67	22,31	2 Dokumen	12.500.000	16,67	5,41
24	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	154.728.700	1 Dokumen	8.050.000	2 Dokumen	40.270.000	2 Dokumen	3.800.000	2 Dokumen	27.300.000	2 Dokumen	27.300.000	100	67,79	3 Dokumen	35.350.000	50	22,85
25	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	37 Dokumen	230.420.000	0 Dokumen	0	21 Dokumen	60.420.000	8 Dokumen	5.200.000	12 Dokumen	24.805.000	12 Dokumen	24.805.000	57,14	41,05	12 Dokumen	24.805.000	32,43	10,77

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Perubahannya**

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab II di atas, bahwa dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan Halong melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ada tambahan 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya serta Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penambahan 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan Semangat Kerja Aparatur Kecamatan Halong, sehingga target-target yang telah ditetapkan baik itu Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja dapat tercapai.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN HALONG TAHUN 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Alasan Perubahan
	Sebelum Perubahan		Sebelum Perubahan		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH</b>	<b>70,40</b>	<b>4.421.066.301</b>	<b>70,40</b>	<b>5.358.223.569</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>773.900</b>	<b>100%</b>	<b>773.900</b>	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	246.300	2 Dokumen	246.300	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	281.300	2 Dokumen	281.300	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	246.300	2 Laporan	246.300	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>3.563.743.601</b>	<b>100%</b>	<b>3.544.370.169</b>	
04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	3.526.644.401	21 Orang	3.511.170.969	
05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	37.099.200	12 Dokumen	33.199.200	
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>84.366.800</b>	

06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	58 Paket	84.366.800	Untuk lebih meningkatkan disiplin dalam pemakaian seragam kerja
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>441.398.000</b>	<b>100%</b>	<b>550.034.800</b>	
07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.458.000	3 Paket	18.229.800	
08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	415.940.000	12 Laporan	531.805.000	
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>739.718.400</b>	
09	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	08	2	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	8 Unit	559.560.000	Untuk lebih meningkatkan mobilisasi ASN Kecamatan Halong
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	170 Unit	180.158.400	Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>249.184.600</b>	<b>100%</b>	<b>258.268.300</b>	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.811.300	12 Laporan	41.178.000	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.373.300	12 Laporan	217.090.300	
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>165.966.200</b>	<b>100%</b>	<b>180.691.200</b>	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	128.958.200	12 Unit	143.683.200	

14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	37.008.000	3 Unit	37.008.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>575.771.300</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>659.307.300</b>	
<b>8</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>6</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>575.771.300</b>	<b>100%</b>	<b>659.307.300</b>	
15	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	575.771.300	21 Laporan	659.307.300	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>249.728.200</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>305.621.200</b>	
<b>9</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>7</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>48.690.000</b>	<b>100%</b>	<b>56.190.000</b>	
16	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	48.690.000	4 Laporan	56.190.000	
<b>10</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>8</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>201.038.200</b>	<b>100%</b>	<b>249.431.200</b>	
17	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	14	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	24 Keluarga	201.038.200	24 Keluarga	249.431.200	

IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>JUMLAH LAPORAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>67.910.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>88.910.000</b>	
11	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	9	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>67.910.000</b>	<b>100%</b>	<b>88.910.000</b>	
18	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67.910.000	12 Laporan	88.910.000	
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>36.670.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>35.920.000</b>	
12	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	10	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>36.670.000</b>	<b>100%</b>	<b>35.920.000</b>	
19	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	16	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	36.670.000	200 Orang	35.920.000	
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>JUMLAH LAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>422.719.600</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>517.668.800</b>	
13	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	11	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya</b>	<b>24</b>	<b>422.719.600</b>	<b>24</b>	<b>517.668.800</b>	
20	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	49.714.600	2 Dokumen	54.814.600	

21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	75.220.000	4 Dokumen	102.380.000	
22	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3 Dokumen	30.020.000	2 Dokumen	35.120.000	
23	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	15.160.000	2 Dokumen	15.160.000	
24	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	19.770.000	1 Dokumen	19.360.000	
25	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	76.120.000	4 Dokumen	135.589.200	
26	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	23	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen	56.025.000	3 Dokumen	54.625.000	
27	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	40.270.000	2 Dokumen	39.300.000	
28	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	21 Dokumen	60.420.000	21 Dokumen	61.320.000	
<b>Jumlah</b>						<b>5.773.865.401</b>		<b>6.965.650.869</b>	

Terkait adanya Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan (sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas), maka untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.526.644.401,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.473.432,-. Hal ini diakibatkan dengan tidak adanya penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) padahal sudah dianggarkan pada Anggaran Murni 2024. Hal ini berdampak juga kepada berkurangnya Target Kinerja Sub Kegiatan.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.099.200,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.900.000,- akibat adanya Tenaga Harian Lepas (THL) dengan Masa Kerja di atas 4 (empat) Tahun yang keluar dan masuk Tenaga Harian Lepas (THL) baru.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 25.458.000,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.228.200,- akibat adanya Pengurangan Belanja Cetak Spanduk/Baliho.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 415.940.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 115.865.000,- dengan tujuan untuk Peningkatan Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan ini baru dimasukkan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P), adapun maksud dan tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan Mobilitas Aparatur.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini baru dimasukkan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P), hal ini disebabkan masih kurangnya Sarana Pendukung Kerja, sehingga nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan Semangat Kerja.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 41.811.300,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 633.300,-, hal ini disebabkan batalnya Belanja Modal

Penambahan Daya Listrik Kantor Kecamatan Halong dikarenakan Trafo PLN masih belum terpasang. Walaupun di Belanja Langganan Internet ada Penambahan Pagu.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 207.373.300,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.717.000,- akibat adanya Penambahan Volume Belanja Alat Tulis Kantor.

- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 128.958.200,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.725.000,- untuk menambah Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 575.771.300,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 94.136.000,- akibat adanya Penambahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Peserta Paskibra.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 48.690.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- akibat adanya Penambahan Volume Belanja Biaya Perjalanan Dinas.
  - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
    - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.  
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 201.038.200,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 48.393.000,- dikarenakan bertambahnya Penambahan Volume Belanja Biaya Perjalanan Dinas.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
    - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.  
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 67.910.000,-, selanjutnya ada

Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- akibat adanya Penambahan Belanja Honorarium Forkopimcam.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 36.670.000,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 750.000,- akibat adanya Penghapusan Belanja Fotocopy/Penggandaan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 49.714.600,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.100.000,- akibat adanya Penambahan Volume Belanja Biaya Perjalanan Dinas.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 75.220.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 27.160.000,- akibat adanya Penambahan Volume beberapa belanja.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.  
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.020.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.100.000,- akibat adanya Penambahan Volume Belanja Biaya Perjalanan Dinas.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.  
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.770.000,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 410.000,- akibat adanya Penghapusan Belanja Fotocopy/Penggandaan.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.  
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 76.120.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 59.469.200,- akibat adanya Penambahan Belanja Operasional Barisan Pemadam Kebakaran (BPK).
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.  
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 56.025.000,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.400.000,- akibat adanya Tenaga Harian Lepas (THL) dengan Masa Kerja di atas 4 (empat) Tahun yang keluar dan masuk Tenaga Harian Lepas (THL)

baru, serta Penambahan Volume Belanja Biaya Perjalanan Dinas.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.270.000,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 970.000,- akibat adanya Penghapusan Belanja Cetak dan Biaya Kebersihan Kegiatan.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 60.420.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 900.000,-. akibat adanya Tenaga Harian Lepas (THL) dengan Masa Kerja di atas 4 (empat) Tahun yang keluar dan masuk Tenaga Harian Lepas (THL) baru, serta Penambahan Volume Belanja Biaya Perjalanan Dinas.

## **B. Analisis Dampak Sosial Ekonomi**

Dengan dilaksanakannya seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel di atas, diharapkan akan berdampak secara Sosial Ekonomi terhadap Masyarakat Kecamatan Halong. Khususnya untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Halong. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Halong sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah, sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
3. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.
4. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan.
5. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Adapun Dampak Sosial Ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan oleh Masyarakat Kecamatan Halong terkait Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan yang mengampu ***Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat*** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial***, yaitu :
  - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Fasilitasi Pelayanan Bantuan Sosial, Kegiatan Penunjang (Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan, Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Kabupaten, Fasilitasi Safari Ramadhan, Fasilitasi Lomba UKS).

Dengan terpenuhinya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Fasilitasi Pelayanan Bantuan Sosial, maka secara **SOSIAL**, masyarakat merasakan hak-haknya sebagai warga negara telah dipenuhi oleh Pemerintah.

b. Sub Kegiatan yang mengampu **Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) **Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif**, yaitu :

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 3) Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Rapat Koordinasi Rembug Stunting Tingkat Kecamatan, Kegiatan TP. PKK Kecamatan dan TP. PKK Desa dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Dengan menurunnya Angka Prevalensi Stunting, maka hal tersebut akan berdampak secara **SOSIAL**.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh TP. PKK Kecamatan dan Desa yang berupa Pelatihan-Pelatihan Keterampilan akan berdampak secara **EKONOMI**.

Dengan semakin Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), diharapkan akan berdampak secara **SOSIAL** terhadap para Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dimaksud.

c. Sub Kegiatan yang mengampu **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani, yaitu :

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- 2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
- 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pembinaan Kerukunan Hidup antar SARA dan Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Seluruh kegiatan tersebut di atas bermuara pada 1 (satu) tujuan, yaitu Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Umum. Sehingga dengan terciptanya keadaan tersebut pada Wilayah Kecamatan Halong, maka akan berdampak besar kepada masyarakat secara **SOSIAL DAN EKONOMI**.

- d. Sub Kegiatan yang mengampu **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan** dan **Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan**, yaitu :

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
- 5) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- 6) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- 7) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan, Peningkatan Kapasitas BPD, Fasilitasi Pembangunan Desa dan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Dengan semakin Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa dan BPD dan selesainya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, diharapkan akan berdampak secara **SOSIAL** terhadap Pemerintahan Desa dan warganya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024, yang selanjutnya akan dibarengi dengan perubahan produk turunannya yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Maka diharapkan dampaknya akan dirasakan, yaitu dengan semakin meningkatnya Semangat Kerja seluruh Aparatur Kecamatan Halong. Sehingga target-target yang telah ditetapkan, baik itu target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun pada Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Halong, 01 Juli 2024



**RAHMADI, S.Sos., M.AP**  
**NIP. 19810914 201001 1 009**